

Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Listiani^{1*}, Henri Agustin²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: listiani.elf@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of inventory, the competence of apparatus, and internal control systems on optimizing the management of regional property. The population of this research is all Regional Apparatus Organizations in Pelalawan Regency. The sampling technique used was total sampling, where as many as 27 Regional Apparatus Organizations in Pelalawan Regency were used as research samples. From each Regional Apparatus Organizations, 4 people were taken as respondents, consisting of 1 Head of General Subdivision, 1 Head of Finance Subdivision, and 2 Managers of Goods, so that a total of 108 respondents were obtained. The data was collected by distributing questionnaires directly to the respondents. This research uses quantitative method and the data were processed using multiple linear regression analysis with the help of the IBM SPSS Statistic version 22. The results of statistical tests stated that the inventory had a positive and significant effect on the optimization of the management of regional property. Meanwhile, the competence of the apparatus and the internal control system has no significant effect on the optimization of the management of regional property.

Keywords: *Inventory; Competence of Apparatus; Internal Control System; Optimization of Management of Regional Property.*

How to cite (APA 6th style)

Listiani & Agustin, H. (2022). Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (4), 861-882.

PENDAHULUAN

Adanya otonomi daerah telah memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Kewenangan otonomi daerah tersebut juga termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan barang milik daerah (BMD). Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, pengelolaan barang milik daerah (BMD) merupakan keseluruhan aktivitas yang mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian atas aset daerah. Menerapkan pengelolaan aset tidaklah mudah. Jumlah dan nilai aset yang sangat besar, serta cakupan keberadaan aset daerah yang sangat luas menjadi tantangan dalam pengelolaan aset daerah (Syaifudin *et al.*, 2020). Meskipun pemerintah daerah telah diberi kewenangan otonomi selama lebih dari 20 tahun, tetapi pengelolaan aset daerah di Indonesia masih belum optimal.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang dirangkum dalam Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2020 yang menjelaskan bahwa terdapat 58 permasalahan terkait pengendalian internal dalam pengelolaan aset daerah. Adapun masalah SPI terkait aset daerah yakni pencatatan tidak akurat atau belum dilakukan, SOP/kebijakan/regulasi tidak lengkap atau belum disusun, kelemahan dalam mengelola fisik aset, dan lain sebagainya. Sementara itu, ditemukan pula masalah ketidakpatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan BMD sebanyak 79 permasalahan, seperti keberadaan aset tetap tidak diketahui, penerimaan belum dipungut/diterima, penyimpangan peraturan BMD, dll.

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, mengingat juga terjadi penyimpangan dan permasalahan aset serta belum adanya penelitian sejenis dengan metode kuantitatif yang dilakukan di lokasi tersebut. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau, ditemukan beberapa kelemahan terkait pengelolaan aset. Salah satunya ialah belum adanya dokumen perjanjian kerjasama sewa dalam kegiatan pemanfaatan aset tetap dengan pihak ketiga. Hal ini berpotensi merugikan daerah karena kurangnya penerimaan daerah. Kondisi tersebut melanggar ketentuan BAB VII tentang Pemanfaatan, pasal 129 terkait perjanjian sewa pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Selain itu, terdapat pula kelemahan berupa pengelolaan aset daerah yang belum tertib, dimana inventarisasi atas aset peralatan dan mesin senilai Rp2.632.542.774,00 tidak diketahui keberadaannya. Kondisi ini menimbulkan potensi kehilangan aset yang merugikan daerah. Masalah tersebut melanggar ketentuan pengelolaan BMD mengenai Penatausahaan pasal 476 Permendagri No. 19/2016 yaitu inventarisasi aset yang belum lengkap. Lebih lanjut, di Kabupaten Pelalawan juga ditemukan permasalahan terkait aset bergerak yang masih dikuasai pihak lain yang sudah tidak memiliki kewenangan. Dalam kasus ini, beberapa mantan anggota DPRD Pelalawan masih memakai kendaraan dinas, padahal status mereka sudah tidak lagi menjabat (kumparan.com, 2021). Hal ini memungkinkan penyelenggaraan tugas di OPD terkait akan terhambat akibat berkurangnya aset kendaraan serta melanggar ketentuan tentang Penggunaan Aset, dimana pengguna barang harus mengembalikan BMD apabila sudah tidak berguna dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya pengelolaan aset di Kabupaten Pelalawan, khususnya dalam hal pengendalian internal terkait aset dan inventarisasi aset, serta aparturnya yang belum maksimal dalam mengelola BMD. Inventarisasi merupakan salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap pengelolaan BMD. Siregar dalam Hartati *et al.* (2019) menyatakan bahwa inventarisasi merupakan tahapan penting yang harus ada untuk meningkatkan pengelolaan aset. Hasil penelitian Asman *et al.* (2016), Ratmono dan Rochmawati (2018), dan Hartati *et al.* (2019), menemukan bahwa inventarisasi memiliki pengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah. Inventarisasi yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi terbukti mampu meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Faktor selanjutnya yang diduga memiliki pengaruh pada optimalisasi manajemen aset ialah kompetensi aparatur pengelola aset. Menurut Kurniati *et al.* (2017) SDM merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Menurut Hastings dalam Syaifudin *et al.* (2020), manajemen aset memerlukan kompetensi SDM yang sesuai dengan penugasannya, termasuk pengetahuan, keterampilan, pengalaman, perilaku, sikap, serta sifat yang sesuai. Hasil penelitian Ekayanti *et al.* (2018), Syaifudin *et al.* (2020), dan Leky *et al.* (2020) menyatakan bahwa kompetensi dari aparatur berpengaruh positif terhadap pengelolaan BMD. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa semakin kompeten aparatur daerah maka kinerja pengelolaan BMD menjadi lebih optimal.

Terakhir, pengendalian internal juga sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan pemda terhadap regulasi terkait dengan pengelolaan BMD (Anisykurlillah dan Oktaviana,

2020). Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, SPI dilakukan sebagai tindakan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi termasuk untuk mencapai pengamanan aset daerah. Hasil penelitian Astini (2018) dan Anisykurlillah dan Oktaviana (2020) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap manajemen aset daerah. Dengan demikian, semakin baik implementasi pengendalian internal, maka semakin baik pula pengelolaan aset daerahnya (Ekayanti *et al.*, 2018).

Topik ini penting untuk diteliti karena berdasarkan fakta di lapangan, pengelolaan aset daerah di Indonesia masih belum optimal dan masih menjadi permasalahan yang selalu ditemukan BPK setiap tahunnya. Sehingga, perlu untuk mengetahui faktor apa saja yang terbukti secara ilmiah dapat menunjang optimalisasi pengelolaan aset daerah. Secara rinci, penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana pengaruh inventarisasi, kompetensi aparatur, dan pengendalian internal terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Implikasinya, setelah mengetahui faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh pada optimalisasi pengelolaan aset, pemerintah daerah dapat memaksimalkan faktor-faktor tersebut untuk memperbaiki pengelolaan aset daerahnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, saran, dan bahan evaluasi yang bermanfaat bagi perbaikan dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD).

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship*

Stewardship Theory yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989 menjelaskan kondisi dimana para manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih mengutamakan kinerja mereka untuk kepentingan organisasi (Lewier, 2016). Menurut Raharjo (2007), teori *stewardship* berpendapat bahwa manajer akan berperilaku untuk kepentingan bersama. Hal ini dikarenakan *steward* menganggap kepentingan bersama dan bertindak sesuai dengan pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha pencapaian tujuan bersama atau organisasi. Teori *stewardship* menjelaskan keberadaan pemerintah daerah sebagai *steward* yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan amanat publik dengan cara melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Anisykurlillah dan Oktaviana (2020) menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai penatalayan (*steward*) akan bertanggungjawab atas pengelolaan barang milik daerah.

Teori Institusional

Teori *new institutional* menurut pemikiran DiMaggio & Powell (1983) berpendapat bahwa organisasi dibentuk oleh konteks kelembagaan yang melingkupinya melalui proses menyesuaikan diri atau isomorfisme. Terdapat tiga proses isomorfisme, yaitu paksaan (*coercive isomorphism*), peniruan (*mimetic isomorphism*), dan normatif (*normative isomorphism*) (DiMaggio dan Powell, 1983; Ratmono dan Rochmawati, 2018). Isomorfisme paksaan (*coercive isomorphism*) muncul ketika suatu organisasi menyesuaikan diri dengan tekanan dari negara, organisasi lain, atau publik. Misalnya ketika ada aturan dan standar khusus yang ditetapkan pemerintah, maka organisasi harus menyesuaikan diri untuk menerima aturan tersebut (Joo *et al.*, 2017). Pemerintah daerah harus beradaptasi (*isomorphism*) dengan perubahan peraturan untuk menghindari sanksi (*coercive isomorphism*) dan menjaga citra serta legitimasi organisasi.

Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu kegiatan memaksimalkan pengurusan aset daerah, mulai dari perencanaan hingga pengendalian,

dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Asman *et al.*, 2016). Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, terdapat asas-asas yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pengelolaan BMN/D, yaitu asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Sementara itu, pengelolaan BMD memiliki tujuan sebagai berikut: (1) menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; (2) terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan BMD; (3) terwujudnya pengelolaan BMD yang tertib, efektif, dan efisien. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan barang milik daerah antara lain: (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) pengadaan; (3) penggunaan; (4) pemanfaatan; (5) pengamanan dan pemeliharaan; (6) penilaian; (7) pemindahtanganan; (8) pemusnahan; (9) penghapusan; (10) penatausahaan; (11) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Inventarisasi

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 inventarisasi merupakan aktivitas mendata, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan barang milik daerah (BMD). Inventarisasi BMD dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Pengecualian untuk persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. Hasil inventarisasi dilaporkan kepada pengelola barang paling lambat tiga (3) bulan setelah inventarisasi selesai. Menurut Siregar dalam Hartati *et al.* (2019) kegiatan yang dilakukan dalam inventarisasi meliputi pendataan, kodifikasi/*labling*, pengelompokan, dan administrasi/pembukuan yang disesuaikan dengan tujuan manajemen aset. Lebih lanjut, inventarisasi aset terbagi atas dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek yuridis atau legal. Aspek inventarisasi fisik terdiri dari bentuk, jenis, luas, lokasi, volume atau jumlah, alamat, dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis atau legal terdiri dari status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan, dan lain sebagainya.

Kompetensi Aparatur

Astini (2018) mendefinisikan kualitas atau kompetensi aparatur sebagai tingkat kemampuan aparatur daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Sumber daya manusia (SDM) dapat dikatakan sebagai ujung tombak keberhasilan suatu organisasi sebab ia merupakan pilar utama dalam pelaksanaan setiap kegiatan serta berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi (Kurniati *et al.*, 2017). Menurut Yanison (2015), pengurus barang setidaknya harus memiliki kompetensi dasar berupa pemahaman terhadap kegiatan pembukuan, memiliki ketelitian, integritas, dan motivasi kerja yang tinggi. Kompetensi SDM pengurus aset dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, diklat, dan pengalaman yang dimiliki sesuai dengan bidang tugasnya (Ratmono dan Rochmawati, 2018).

Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP, Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan proses yang menyeluruh pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberi keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi melalui aktivitas yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap regulasi. Syaifudin *et al.* (2020) menyatakan bahwa SPI memiliki peran penting dalam penyelenggaraan penatausahaan aset daerah untuk menjamin kelancaran pengelolaan BMD yang akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurut Ekayanti *et al.* (2018), SPI harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparatur daerah untuk memberikan perlindungan bagi organisasi dari kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan tindakan

yang kurang/tidak sesuai dengan aturan. Pelaksanaan SPI dilandaskan pada lima unsur yaitu: (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) pemantauan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah mengemukakan berbagai variabel yang dapat memengaruhi optimalisasi pengelolaan BMD. Astini (2018) melakukan riset tentang pengaruh sistem informasi (SI) dan sistem pengendalian intern (SPI) yang dimoderasi dengan variabel kualitas aparatur terhadap efektivitas manajemen aset tetap. Hasilnya adalah SI memiliki pengaruh negatif signifikan, sedangkan SPI berpengaruh positif signifikan, dan variabel kualitas aparatur terbukti mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh SI dan SPI terhadap efektivitas manajemen aset tetap. Riset sejenis juga dilakukan oleh Asman *et al.*, (2016) yang menguji pengaruh inventarisasi, legal audit, penilaian aset, dan pengawasan dan pengendalian aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap. Hasilnya menunjukkan bahwa inventarisasi, legal audit, dan penilaian secara individual berpengaruh positif signifikan, sedangkan pengawasan dan pengendalian tidak berpengaruh signifikan.

Selanjutnya, Ratmono dan Rochmawati (2018) juga melakukan riset yang serupa dengan menganalisis determinan optimalisasi penggunaan aset tetap. Temuannya menunjukkan bahwa perencanaan dan inventarisasi berpengaruh positif signifikan, sedangkan penilaian aset, pengawasan dan pengendalian, kualitas SDM, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset tetap. Penelitian Syaifudin *et al.* (2020) bermaksud untuk menganalisis efektivitas pengelolaan aset dan bagaimana dampaknya terhadap kewajaran penyajian aset dalam neraca pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menemukan bahwa komitmen pimpinan, kompetensi pegawai, penerapan sistem informasi pengelolaan aset daerah berpengaruh positif signifikan. Sementara itu, SPI memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap efektivitas kinerja manajemen aset. Serta kinerja pengelolaan aset daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap kewajaran penyajian aset pada neraca keuangan pemerintah daerah.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Inventarisasi dengan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Inventarisasi merupakan bagian dari penatausahaan aset, dimana penatausahaan sendiri merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan BMD. Menurut Soleh dan Rochmansjah dalam Asman *et al.* (2016), inventarisasi dilakukan untuk menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, serta mutakhir terkait aset daerah yang nantinya akan memudahkan pemda dalam pemantauan dan pengelolaan BMD. Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah daerah sebagai *steward* akan berusaha menjalankan amanat masyarakat semaksimal mungkin untuk mencapai kinerja yang memuaskan masyarakat (Raharjo, 2007), begitu pula halnya dengan melakukan inventarisasi. Pelaksanaan inventarisasi yang baik dapat meminimalisir permasalahan dan penyimpangan aset sehingga nantinya akan mencapai pengelolaan BMD yang optimal. Hasil penelitian Ratmono dan Rochmawati (2018), menemukan bahwa inventarisasi memiliki pengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah. Inventarisasi yang baik dapat memberikan informasi BMD secara lengkap dan *ter-update*. Tersedianya informasi aset yang lengkap, jelas, dan akurat, maka dapat memudahkan organisasi untuk menggunakan serta memanfaatkan aset tersebut, yang pada akhirnya juga akan memudahkan pengelolaan BMD. Temuan tersebut sejalan dengan Asman *et al.* (2016) dan Hartati *et al.* (2019) yang menemukan bahwa semakin diterapkannya inventarisasi BMD yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka semakin optimal pengelolaan asetnya. Maka, hipotesis 1 dirumuskan sebagai berikut.

H₁: Inventarisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

Hubungan Kompetensi Aparatur dengan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Kurniati *et al.* (2017) sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Aparatur pengelola BMD sebagai *steward* akan bertindak untuk memaksimalkan kinerjanya demi mencapai kepentingan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal pengelolaan aset yang optimal, maka diperlukanlah SDM yang berkompeten sesuai dengan bidang penugasannya. Kompetensi SDM ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, diklat yang dijalani, dan pengalaman (Ratmono dan Rochmawati, 2018). Hasil penelitian Ekayanti *et al.* (2018) menyatakan bahwa tingkat kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pengelolaan BMD. Artinya, semakin tinggi kualitas atau kompetensi aparatur pengelola aset, maka pengelolaan aset akan lebih efektif. Hasil tersebut juga didukung oleh Leky *et al.* (2020) dan Syaifudin *et al.* (2020). Kompetensi pengelola barang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan aset daerah, dimana semakin baik kompetensi pengelola barang maka akan semakin optimal kinerja manajemen asetnya (Syaifudin *et al.*, 2020). Dengan demikian, hipotesis 2 dirumuskan sebagai berikut.

H₂: Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

Hubungan Sistem Pengendalian Internal dengan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengendalian internal juga sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan penda terhadap regulasi terkait dengan pengelolaan BMD (Anisykurlillah dan Oktaviana, 2020). Demi menjamin kelancaran pengelolaan aset daerah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, peran pengawasan sangat penting untuk menjamin terselenggaranya penatausahaan aset daerah secara tertib (Syaifudin *et al.*, 2020). Malau (2017) menyatakan bahwa untuk mendukung optimalisasi pengelolaan BMD yang efisien dan efektif, harus ada upaya perbaikan dan peningkatan oleh instansi pemerintah dalam menerapkan SPIP sebagai alat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Aturan SPIP sebagai salah satu bentuk *coersive isomorphism*, mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan kontrol yang cukup dan memadai dalam semua kegiatan operasionalnya termasuk dalam mengelola aset daerah (Anisykurlillah dan Oktaviana, 2020). Hasil penelitian Astini (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap manajemen aset daerah. Hasil tersebut sejalan dengan Ekayanti *et al.* (2018) yang membuktikan bahwa dengan adanya SPI yang memadai akan terjadi peningkatan kualitas pengelolaan aset tetap yang efektif. Artinya, semakin baik implementasi pengendalian internal, maka semakin baik pula pengelolaan aset daerahnya. Dengan demikian, hipotesis 3 dirumuskan sebagai berikut.

H₃: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausatif yang tujuannya untuk melakukan analisis pengaruh pada variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebanyak 27 OPD sebagaimana yang terdapat dalam *website* pelalawan.kab.go.id. Penarikan sampel menggunakan metode *total sampling*. Dari 27 OPD, akan dipilih masing-masing 4 orang sebagai responden yang terdiri dari 1 orang Kasubbag Umum, 1 orang Kasubbag Keuangan, dan 2 orang Penatausaha/Pengurus/Penyimpan Barang, sehingga total sampel yang diperoleh sebanyak 108 responden.

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data subjek yang berupa opini, pengalaman, sikap, dan karakter dari seorang individu atau kelompok yang menjadi responden atau subjek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket.

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini ialah Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y). Sedangkan variabel independen pada penelitian ini yaitu Inventarisasi (X_1), Kompetensi Aparatur (X_2), dan Sistem Pengendalian Internal (X_3). Seluruh variabel dalam penelitian ini diukur dengan skala Likert 5 poin.

Instrumen Penelitian

Tabel 1
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Dimensi/Aspek	Nomor Item Pernyataan	Referensi
Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y)	Kegiatan pengelolaan BMD berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2016.	1-16	Permendagri 19/2016, Malau (2017), Asman <i>et al.</i> , (2016), dan Syaifudin <i>et al.</i> , (2020).
Inventarisasi (X1)	1. Inventarisasi fisik	1-3	Asman <i>et al.</i> , (2016), Atikoh <i>et al.</i> , (2017), dan Jusmin (2013).
	2. Inventarisasi yuridis atau legal	4-6	
Kompetensi Aparatur (X2)	1. Latar belakang pendidikan	1-3	Juliadi <i>et al.</i> , (2017), Astini (2018), dan Syaifudin <i>et al.</i> , (2020).
	2. Pelatihan	4-6	
	3. Pengalaman	7-10	
Sistem Pengendalian Internal (X3)	1. Lingkungan pengendalian	1-4	Malau (2017) dan PP Nomor 60 Tahun 2008.
	2. Penilaian risiko	5-8	
	3. Kegiatan pengendalian	9-12	
	4. Informasi dan komunikasi	13-16	
	5. Pemantauan	17-20	

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif menurut Ghazali (2016:19). bermaksud untuk memberikan gambaran atau deskripsi data penelitian agar diperoleh informasi yang jelas dan mudah dipahami yang diinterpretasikan melalui nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari setiap variabel.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas atas instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui akurasi. Uji validitas dapat dihitung dengan korelasi Pearson (*Pearson Correlation*) melalui aplikasi SPSS versi 22 dengan melihat tingkat signifikansi atas semua item pertanyaan atau pernyataan pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Instrumen penelitian dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bermaksud untuk menguji konsistensi jawaban responden atas semua item pernyataan atau pertanyaan yang digunakan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah dengan koefisien *Cronbach's Alpha*. Secara umum, suatu instrumen dapat dinyatakan reliabel apabila mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,7 (Ghozali, 2016:48).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 0,05 ($\alpha=5\%$). Data akan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya $>$ 0,05, sebaliknya apabila nilai signifikansinya $<$ 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Model regresi dikatakan baik apabila tidak ada korelasi di antara variabel bebas. Pendeteksian multikolinieritas dalam model regresi dilakukan dengan membandingkan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF $<$ 10 dan nilai *tolerance* $>$ 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Salah satu uji heteroskedastisitas ialah Uji Gletser yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen lainnya. Jika nilai Sig $>$ 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ditujukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Ghozali (2016:94) menyatakan bahwa analisis regresi linear berganda juga digunakan untuk memberi gambaran arah hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Optimalisasi pengelolaan BMD
- α = Konstanta
- β_1 - β_3 = Koefisien regresi
- X_1 = Inventarisasi
- X_2 = Kompetensi aparatur
- X_3 = Sistem pengendalian internal (SPI)
- e = Standar error

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) ditujukan untuk menguji seberapa besar model mampu menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) berkisar antara 0 sampai 1, apabila $R^2=0$ artinya tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, sedangkan jika $R^2=1$ maka artinya secara keseluruhan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dan tidak ada faktor lainnya yang bisa menimbulkan fluktuasi variabel terikat. Untuk model regresi dengan lebih dari dua variabel independen digunakan *adjusted R²* (Ghozali, 2016:95-96).

Uji Hipotesis

Uji Statistik f (Uji Simultan)

Menurut Ghozali (2016:96), uji statistik f digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi $f < 0,05$ atau $f\text{-hitung} > f\text{-tabel}$, maka ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas dan variabel terikat.

Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh suatu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat (Ghozali, 2016:97). Apabila nilai signifikansi $t < 0,05$ atau $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara signifikan, artinya H_0 diterima, begitupun sebaliknya.

Definisi Operasional

Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu kegiatan memaksimalkan pengurusan aset daerah, mulai dari perencanaan hingga pengendalian, dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Inventarisasi

Inventarisasi merupakan aktivitas mendata, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan barang milik daerah (BMD) yang dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun dan 1 kali dalam setahun khusus untuk persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.

Kompetensi Aparatur

Kompetensi aparatur merupakan tingkat kemampuan aparatur daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kompetensi aparatur dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan proses yang menyeluruh pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberi keyakinan yang cukup atas pencapaian tujuan organisasi melalui aktivitas yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Populasi pada penelitian ini sebanyak 27 OPD yang seluruhnya dijadikan sampel penelitian (*total sampling*). Masing-masing sampel diambil 4 orang responden yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan 2 orang Pengurus/Penyimpan Barang, sehingga jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 108 kuesioner. Dari 108 kuesioner yang disebar, kuesioner yang dikembalikan dan dapat diolah sebanyak 99 kuesioner.

Karakteristik Responden

Tabel 2
Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	51	51,52%
	Perempuan	48	48,48%
Pendidikan Terakhir	SLTA	14	14,14%
	D3	8	8,08%
	S1	70	70,71%
	S2	7	7,07%
Jabatan	Kasubbag Umum	27	27,27%
	Kasubbag Keuangan	20	20,20%
	Pengurus Barang	43	43,43%
	Lainnya	9	9,09%
Masa Kerja	1-5 Tahun	10	10,10%
	6-10 Tahun	17	17,17%
	11-15 Tahun	36	36,36%
	16-20 Tahun	29	29,29%
	≥20 Tahun	7	7,07%
Masa Kerja di Bidang BMD	≤1 Tahun	29	29,29%
	1-2 Tahun	11	11,11%
	3-4 Tahun	30	30,30%
	≥5 Tahun	29	29,29%
Jumlah Diklat/Bimtek	0 Kali	12	12,12%
	1-2 Kali	49	49,49%
	3-5 Kali	30	30,30%
	6-10 Kali	8	8,08%

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 2, jabatan di bidang BMD didominasi oleh laki-laki sebanyak 51,52%. Pendidikan terakhir mayoritas responden adalah S1 sebesar 70,71%. Jabatan sebagai pengurus barang mendominasi sebanyak 43,43%. Masa kerja responden paling banyak antara 11-15 tahun yaitu sebesar 36,36%. Sebanyak 30,30% responden telah bekerja di bidang BMD selama 3-4 tahun. Sebagian besar responden yakni 49,49% pernah mengikuti diklat/bimtek sebanyak 1-2 kali.

Hasil Analisis Data
Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Inventarisasi (X1)	99	12	18	30	24,17	2,572
Kompetensi Aparatur (X2)	99	24	26	50	39,86	4,901
SPI (X3)	99	44	56	100	79,69	7,969
Optimalisasi Pengelolaan BMD (Y)	99	32	48	80	64,84	6,563
Valid N (listwise)	99					

Sumber: Output SPSS Statistics 22, 2022

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 data. Variabel inventarisasi (X₁) memiliki nilai *maximum* sebesar 30 dan nilai *minimum* sebesar 18 dengan *range* 12. Selain itu, variabel inventarisasi memiliki nilai *mean* 24,17 dan nilai standar deviasi sebesar 2,572. Variabel kompetensi aparatur (X₂) memiliki nilai *maximum* sebesar 50 dan nilai *minimum* sebesar 26 dengan *range* 24. Selanjutnya, variabel kompetensi aparatur memiliki nilai *mean* 39,86 dan nilai standar deviasi sebesar 4,901. Variabel sistem pengendalian internal (X₃) memiliki nilai *maximum* sebesar 100 dan nilai *minimum* sebesar 56 dengan *range* 44. Variabel SPI memiliki nilai *mean* sebesar 79,69 dan standar deviasi sebesar 7,969. Variabel optimalisasi pengelolaan BMD (Y) memiliki nilai *maximum* sebesar 80 dan nilai *minimum* sebesar 48 dengan *range* 32. Variabel Y memiliki nilai *mean* sebesar 64,84 dan standar deviasi sebesar 6,563. Diketahui seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai *mean*, artinya adalah penyimpangan data yang terjadi rendah dan penyebaran nilainya merata.

Hasil Uji Kualitas Data
Hasil Uji Validitas

Nilai r-tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dimana n merupakan jumlah responden, maka df untuk penelitian ini adalah 97, dengan taraf signifikansi 5%, maka nilai r-tabel adalah 0,198.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Butir Item	r-hitung				r-tabel	Ket
	X1	X2	X3	Y		
1	0,710	0,555	0,612	0,567	0,198	Valid
2	0,682	0,637	0,554	0,593	0,198	Valid
3	0,729	0,638	0,555	0,591	0,198	Valid
4	0,614	0,663	0,601	0,534	0,198	Valid
5	0,631	0,656	0,644	0,555	0,198	Valid
6	0,685	0,686	0,673	0,589	0,198	Valid
7		0,740	0,641	0,661	0,198	Valid
8		0,633	0,590	0,664	0,198	Valid
9		0,781	0,661	0,570	0,198	Valid
10		0,809	0,703	0,333	0,198	Valid
11			0,627	0,532	0,198	Valid
12			0,691	0,590	0,198	Valid
13			0,680	0,681	0,198	Valid

14	0,626	0,581	0,198	Valid
15	0,593	0,773	0,198	Valid
16	0,672	0,726	0,198	Valid
17	0,537		0,198	Valid
18	0,598		0,198	Valid
19	0,582		0,198	Valid
20	0,738		0,198	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa nilai r-hitung dari setiap butir pernyataan lebih besar dari r-tabel 0,198. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan pada variabel independen dan variabel dependen adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas	Keterangan
Inventarisasi (X1)	0,762	0,7	Reliabel
Kompetensi Aparatur (X2)	0,868	0,7	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,919	0,7	Reliabel
Optimalisasi Pengelolaan BMD (Y)	0,870	0,7	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada setiap variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,7. Maka, dapat disimpulkan bahwa kuesioner penelitian yang digunakan telah reliabel atau andal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,88514744
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,057
	Positive	,057
	Negative	-,048
Test Statistic		,057
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS Statistics 22, 2022

Tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 99 data menghasilkan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini telah lulus uji normalitas dan data terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	11,610	4,255		2,728	,008		
Inventarisasi	1,623	,237	,636	6,836	,000	,426	2,346
Kompetensi Aparatur	,116	,124	,086	,930	,355	,428	2,338
SPI	,118	,073	,143	1,611	,110	,468	2,137

a. Dependent Variable: Optimalisasi Pengelolaan BMD

Sumber: Output SPSS Statistics 22, 2022

Berdasarkan Tabel 7, nilai *tolerance* dari setiap variabel independen adalah lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF untuk seluruh variabel bebas ialah lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,149	2,577		2,386	,019
Inventarisasi	-,272	,144	-,291	1,890	,062
Kompetensi Aparatur	,063	,075	,128	,832	,407
SPI	,012	,044	,040	,272	,786

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Output SPSS Statistics 22, 2022

Berdasarkan tabel 8, hasil uji Glesjer menunjukkan bahwa nilai sig lebih besar dari 0,05 untuk masing-masing variabelnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 9
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,610	4,255		2,728	,008
Inventarisasi	1,623	,237	,636	6,836	,000
Kompetensi Aparatur	,116	,124	,086	,930	,355
SPI	,118	,073	,143	1,611	,110

a. Dependent Variable: Optimalisasi Pengelolaan BMD

Sumber: Output SPSS Statistics 22, 2022

Berdasarkan tabel 9 diperoleh persamaan regresi linear berganda (*Unstandardized Coefficients*) sebagai berikut:

$$Y = 11,610 + 1,623X_1 + 0,116X_2 + 0,118X_3$$

Berdasarkan persamaan di atas, diketahui nilai konstanta 11,610 menjelaskan bahwa nilai variabel Optimalisasi Pengelolaan BMD (Y) tanpa dipengaruhi oleh variabel bebas Inventarisasi (X_1), Kompetensi Aparatur (X_2), dan SPI (X_3), nilainya sebesar 11,610. Nilai koefisien inventarisasi (X_1) sebesar 1,623, berarti bahwa jika inventarisasi meningkat 1 satuan, maka variabel Optimalisasi Pengelolaan BMD akan bertambah sebesar 1,623, dengan asumsi variabel lainnya bernilai 0. Nilai koefisien kompetensi aparatur (X_2) adalah sebesar 0,116 berarti bahwa jika kompetensi aparatur meningkat 1 satuan, maka Optimalisasi Pengelolaan BMD akan bertambah sebesar 0,116, dengan asumsi variabel lainnya bernilai 0. Nilai koefisien SPI (X_3) diketahui sebesar 0,118 menjelaskan bahwa apabila variabel SPI meningkat 1 satuan, maka variabel Optimalisasi Pengelolaan BMD akan bertambah sebesar 0,118, dengan asumsi variabel lainnya bernilai 0.

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10
Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,806 ^a	,650	,639	3,946

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, Inventarisasi

Sumber: Output SPSS Statistics 22, 2022

Berdasarkan tabel 10 *Model Summary*, diperoleh nilai *Adjusted R Square* 0,639 atau 63,9%. Angka tersebut menjelaskan bahwa variabel dependen Optimalisasi Pengelolaan BMD dapat dijelaskan sebesar 63,9% oleh variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri atas Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Sistem Pengendalian Internal. Sedangkan

sisanya 36,1% (100% – 63,9%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Statistik F (Uji Simultan)

Tabel 11 Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2742,166	3	914,055	58,702	,000 ^b
	Residual	1479,248	95	15,571		
	Total	4221,414	98			

a. Dependent Variable: Optimalisasi Pengelolaan BMD

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, Inventarisasi

Sumber: Output SPSS Statistics 22, 2022

F-tabel = F(k ; n-k) = F(3;96) = 2,70

Berdasarkan tabel hasil uji F, diperoleh nilai sig sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, dan nilai f-hitung sebesar 58,702, lebih besar dari f-tabel 2,70. Maka dapat disimpulkan bahwa Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Pengelolaan BMD.

Hasil Uji Statistik t (Uji Parsial)

Tabel 12 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	11,610	4,255			2,728	,008
Inventarisasi	1,623	,237	,636		6,836	,000
Kompetensi Aparatur	,116	,124	,086		,930	,355
SPI	,118	,073	,143		1,611	,110

a. Dependent Variable: Optimalisasi Pengelolaan BMD

Sumber: Output SPSS Statistics 22, 2022

T-tabel = t(alfa/2 ; n-k-1) = t(0,025 ; 95) = 1,98525

Berdasarkan hasil pengujian statistik t pada tabel 12, dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis dengan uji statistik t sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis 1

Variabel inventarisasi (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t-hitung sebesar $6,836 > t\text{-tabel } 1,985$. Hal ini berarti secara parsial, variabel inventarisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa hipotesis 1 **diterima**.

Pengujian Hipotesis 2

Variabel kompetensi aparatur (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,355 > 0,05$ dan nilai t-hitung sebesar $0,930 < t\text{-tabel } 1,985$. Hal ini berarti secara parsial, variabel kompetensi aparatur tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa hipotesis 2 **ditolak**.

Pengujian Hipotesis 3

Variabel sistem pengendalian internal (X_3) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,110 > 0,05$ dan nilai t-hitung sebesar $1,611 < t\text{-tabel } 1,985$. Artinya secara parsial, variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa hipotesis 3 **ditolak**.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Inventarisasi terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel inventarisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Maksudnya adalah secara parsial, semakin tertib dan lengkapnya pelaksanaan inventarisasi, maka pengelolaan BMD akan semakin optimal. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa OPD di Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan inventarisasi aset dengan baik dan tertib. Hal ini tercermin pada jawaban yang diberikan oleh responden dimana pada setiap item pernyataan inventarisasi memiliki indeks yang baik. Itu artinya, inventarisasi yang telah dilaksanakan oleh OPD, baik secara fisik maupun legal telah mampu meningkatkan pengelolaan BMD ke arah yang lebih maksimal.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Asman *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa apabila inventarisasi dilaksanakan dengan baik, lengkap, dan benar, maka akan mengoptimalkan pengelolaan aset. Lebih lanjut, kegiatan inventarisasi yang tertib ini telah terbukti meningkatkan pengelolaan aset, dampaknya Kabupaten Sumbawa mampu memperoleh opini WTP dari BPK setelah beberapa tahun sebelumnya memperoleh opini WTP-DPP akibat adanya permasalahan penatausahaan aset (Asman *et al.*, 2016). Ratmono dan Rochmawati (2018) juga menemukan bahwa inventarisasi memiliki pengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah. Inventarisasi yang baik dapat memberikan informasi BMD secara lengkap dan *ter-update* yang dapat memudahkan organisasi untuk menggunakan serta memanfaatkan aset tersebut, hingga pada akhirnya juga akan memudahkan pengelolaan BMD. Temuan ini juga sejalan dengan Hartati *et al.* (2019) yang menemukan bahwa semakin diterapkannya inventarisasi BMD yang sesuai regulasi, maka semakin optimal pengelolaan asetnya, salah satunya dengan melakukan pencatatan dan pelaporan barang dalam pemakaian terbukti dapat memaksimalkan pengelolaan aset tetap.

Temuan penelitian ini mendukung teori *stewardship*, dimana para pegawai OPD sebagai *steward* (penatalayan) akan mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individunya. Salah satu bentuk *stewardship* dalam hubungan ini adalah dalam melaksanakan tugas pengelolaan aset daerah yakni inventarisasi, *steward* akan berusaha memaksimalkan kegiatan inventarisasi tersebut agar tujuan inventarisasi yang diharapkan dapat tercapai. Dalam penelitian ini, diketahui OPD telah mengupayakan pelaksanaan inventarisasi yang tertib, melalui aktivitas pendataan, pencatatan, dan pelaporan secara fisik maupun legal terhadap seluruh BMD yang dimiliki. Dampaknya adalah tercapainya kepentingan organisasi yang berupa pengelolaan BMD yang efektif akibat dari inventarisasi yang dilaksanakan dengan baik.

Output dari kegiatan inventarisasi adalah menghasilkan laporan buku inventarisasi yang lengkap, tertib, dan berkelanjutan yang akan digunakan untuk menyusun laporan BMD yang akhirnya akan menjadi bagian dari LKPD (Pauweni *et al.*, 2017). Pada penelitian ini dapat diidentifikasi bahwa OPD telah melaksanakan prosedur inventarisasi yang terdiri atas 4 tahapan yakni tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tahap tindak lanjut. Akan tetapi,

pada tahap tindak lanjut, kegiatan menindaklanjuti barang yang tidak diketahui keberadaannya inilah yang belum sepenuhnya dilakukan, sehingga masih menjadi catatan BPK dalam LHP. Namun secara keseluruhan, inventarisasi yang dilakukan oleh OPD dapat dikatakan efektif, yang dibuktikan dengan diperolehnya opini WTP atas LKPD.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan pelaksanaan inventarisasi yang sesuai dengan regulasi terbukti dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan BMD pada Organisasi Perangkat Daerah. Akan tetapi, temuan penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Umbora *et al.* (2018) dan Sriasiti *et al.* (2020) yang menemukan bahwa inventarisasi tidak berpengaruh pada optimalisasi pengelolaan BMD.

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel kompetensi aparatur secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Artinya, temuan penelitian ini gagal dalam membuktikan pengaruh positif yang signifikan antara kompetensi aparatur dengan optimalisasi pengelolaan BMD. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ratmono dan Rochmawati (2018) yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif terhadap optimalisasi aset tetap. Temuan ini juga sejalan dengan Kurniyanta *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset *idle*.

Akan tetapi, temuan penelitian ini tidak sejalan dengan Malau (2017), Ekayanti *et al.* (2018), dan Syaifudin *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan BMD. Syaifudin *et al.* (2020) menyatakan dengan kompetensi pengelola aset yang baik, maka kinerja pengelolaan aset semakin optimal. Hasil penelitian Ekayanti *et al.* (2018) juga menyatakan bahwa kualitas SDM merupakan salah satu faktor yang diperlukan dalam peningkatan efektivitas pengelolaan aset. Hal ini ditunjukkan dari latar belakang pendidikan SDM yang sesuai dengan bidang kerja, masa kerja yang cukup lama, serta diklat dan bimtek yang memadai.

Penolakan terhadap hipotesis 2 ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya indikator pendidikan yang tercermin dalam pernyataan kedua pada variabel kompetensi aparatur yang menunjukkan nilai indeks jawaban pada kategori cukup. Itu artinya kualifikasi pendidikan pegawai yang menangani pengelolaan aset, belum sepenuhnya sesuai dengan jabatan tersebut. Latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugas ini akan menyebabkan pegawai kurang cakap dalam melaksanakan pengelolaan BMD. Namun, peneliti belum menemukan aturan yang baku terkait tingkat dan latar belakang pendidikan yang disyaratkan bagi pengurus barang, DKI Jakarta mensyaratkan tingkat pendidikan pengurus barang minimal D3 tanpa menyebut bidang/jurusan, sedangkan DI Yogyakarta tidak mensyaratkan tingkat pendidikan bagi pengurus barang. Akan tetapi, aparatur dengan latar belakang pendidikan dari bidang Ekonomi akan memiliki pengetahuan yang lebih banyak terkait pengelolaan aset dibandingkan bidang/jurusan lainnya, sehingga pengelolaan BMD akan lebih baik dilaksanakan oleh SDM yang berasal dari bidang Ekonomi.

Selain itu, tertolaknya hipotesis 2 juga disebabkan oleh kurang maksimalnya kinerja pegawai dikarenakan jumlah diklat atau bimtek di bidang pengelolaan BMD yang pernah diikuti. Dapat dilihat pada tabel 2, mayoritas aparatur hanya pernah mengikuti diklat/bimtek terkait aset sebanyak 1-2 kali dan beberapa aparatur belum pernah mengikuti diklat sama sekali. Dalam hal jumlah diklat/bimtek ini, tidak ditemukan syarat minimum diklat yang harus diikuti. Namun, jumlah tersebut dapat dikatakan sangat minim, mengingat tuntutan pengelolaan BMD yang semakin kompleks berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 serta semakin banyaknya barang yang harus dikelola. Minimnya diklat/bimtek yang pernah

diikuti menyebabkan kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan aset, yang akan berdampak pada kurang optimalnya kinerja pengelolaan BMD secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ratmono dan Rochmawati (2018) yang juga menemukan bahwa kualitas SDM tidak memiliki pengaruh positif terhadap optimalisasi aset. Temuan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kualifikasi pendidikan SDM pengelola aset yang tidak sepenuhnya sesuai dengan bidangnya menyebabkan pegawai kurang maksimal dalam mengelola aset. Selain itu, lebih dari 50% pimpinan OPD yang sekaligus sebagai pengguna barang belum pernah mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi tentang pengelolaan aset yang menyebabkan pemahaman pimpinan OPD masih kurang terkait pengelolaan aset. Penelitian ini juga sejalan dengan Kurniyanta *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset *idle*. Temuan ini disebabkan karena aset *idle* wajib diserahkan kepada Pengelola Barang (Kabupaten) untuk dikelola, sehingga keterlibatan aparatur OPD menjadi sangat terbatas dalam pengelolaan aset *idle*.

Temuan penelitian ini membuktikan bahwa *stewardship* yang dilakukan oleh aparatur (*steward*) belum berhasil. Seharusnya, *steward* akan berusaha meningkatkan kompetensinya untuk memaksimalkan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007; Lewier, 2016). Kompetensi aparatur pengelola aset yang belum memadai, akan menyebabkan kinerja mereka juga apa adanya, sehingga tujuan organisasi dalam mengoptimalkan pengelolaan BMD belum mampu dicapai dengan kualifikasi kompetensi yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur pengelola barang pada OPD di Kabupaten Pelalawan masih kurang memadai, sehingga kinerja pengelolaan aset yang dilakukan oleh aparatur OPD saat ini belum mampu mengoptimalkan pengelolaan aset yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Kelemahan dalam pengelolaan BMD juga masih ditemui, dapat diidentifikasi dari indeks jawaban responden yang berada dalam kategori cukup pada variabel optimalisasi pengelolaan BMD. Diantaranya ialah pegawai belum memaksimalkan pemanfaatan aset sehingga terdapat beberapa aset yang menganggur. Selain itu, pemindahtanganan BMD yang tidak lagi digunakan dan dimanfaatkan oleh OPD masih belum sepenuhnya dilakukan. Ada sebagian pegawai yang menganggap bahwa pemindahtanganan BMD akan mengurangi aset dan merugikan organisasi, sehingga menjawab tidak setuju dalam hal ini. Padahal, pemindahtanganan aset merupakan salah satu aktivitas dalam pengelolaan BMD yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Kondisi tersebut membuktikan bahwa masih kurangnya pengetahuan aparatur dalam mengelola BMD.

Implikasi temuan riset ini dapat memberikan tambahan informasi dan masukan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola BMD. Perbaikan kompetensi aparatur salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan diklat, bimtek, atau seminar pengelolaan aset secara rutin bagi seluruh pengelola barang (Syarifudin *et al.*, 2020). Dengan melakukan diklat dan bimtek, diharapkan dapat menambah keterampilan dan pengetahuan pengelola barang, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan profesional. Sebab, apabila kompetensi aparatur pengelola barang semakin baik, maka akan semakin baik pula kinerja pengelolaan barang milik daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Artinya, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa SPI mampu memberikan pengaruh yang signifikan pada optimalisasi pengelolaan BMD. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Asman *et al.* (2016) yang menemukan bahwa pengawasan dan

pengendalian aset tidak berpengaruh signifikan pada optimalisasi pengelolaan aset. Temuan ini juga sejalan dengan Malau (2017) yang menemukan bahwa SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel mediasi optimalisasi pengelolaan BMD.

Akan tetapi, temuan penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Astini (2018), Ekayanti *et al.* (2018), dan Syaifudin *et al.* (2020) yang menemukan bahwa SPI memiliki pengaruh positif pada efektivitas pengelolaan aset. Hasil penelitian Ekayanti *et al.* (2018) membuktikan bahwa dengan adanya penerapan SPI yang cukup, maka akan diikuti dengan peningkatan efektivitas pengelolaan barang milik daerah. Astini (2018) juga menyatakan bahwa semua komponen SPI yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring harus dibangun secara memadai, sehingga akan meningkatkan efektivitas manajemen aset tetap.

Tertolakannya hipotesis 3 ini dapat disebabkan karena masih ditemukannya kelemahan dalam penerapan SPI. Hal ini dapat diidentifikasi dari jawaban responden dengan indeks terendah pada masing-masing aspek SPI. Pada unsur lingkungan pengendalian, indikator peningkatan kompetensi pegawai melalui program pelatihan belum sepenuhnya dilakukan oleh organisasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.7 dimana masih adanya pegawai yang belum pernah mengikuti diklat/bikmtek pengelolaan BMD sama sekali. Sementara itu, pada unsur penilaian risiko, ditemukan bahwa OPD belum melakukan identifikasi dan manajemen risiko yang memadai. Dalam hal ini, risiko yang belum diidentifikasi dan dikelola dengan baik salah satunya dalam penatausahaan aset, dibuktikan dengan masih adanya aset yang keberadaannya tidak diketahui dan menjadi catatan BPK dalam LHP 2021.

Selanjutnya, pada unsur kegiatan pengendalian, evaluasi terhadap struktur dan tupoksi OPD belum rutin dilakukan. Dalam hal ini, struktur dan tupoksi organisasi cenderung sama selama bertahun-tahun dan sangat jarang dilakukan evaluasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, pada unsur informasi dan komunikasi, mekanisme komunikasi yang diterapkan masih kurang efektif, dimana informasi tidak selalu didapatkan dan disampaikan secara tepat waktu. Dalam hal ini, penyampaian beberapa LPJ belum sepenuhnya tepat waktu yang juga menjadi temuan BPK dalam LHP 2021. Terakhir, pada unsur pemantauan, diketahui bahwa OPD tidak selalu menangani kelemahan yang ditemukan dalam evaluasi dengan segera. Salah satunya dalam tahap tindak lanjut inventarisasi, dimana permasalahan keberadaan aset yang hilang tidak segera diselesaikan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Asman *et al.* (2016) yang juga menemukan bahwa pengawasan dan pengendalian aset tidak memberikan banyak pengaruh pada optimalisasi pengelolaan aset. Hal ini disebabkan karena Kepala OPD selaku pengguna barang hanya sebatas administratif, dan cenderung jarang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap pengelolaan barang. Selain itu, peran inspektorat sebagai auditor internal juga masih kurang optimal dalam pengawasan dan penilaian kebijakan akuntansi yang diterapkan pada OPD di Kabupaten Sumbawa (Asman *et al.*, 2016).

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Malau (2017) yang menemukan bahwa SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan BMD sebagai variabel mediasi. Temuan tersebut disebabkan oleh masih adanya sejumlah unsur dalam SPI yang belum diimplementasikan. Pada unsur kegiatan pengendalian masih terdapat beberapa kelemahan berupa pengendalian terhadap pengelolaan sistem informasi BMD yang belum maksimal, kurangnya pengendalian kondisi fisik aset tetap dan tanah, adanya rangkap jabatan, dan adanya pencatatan yang tidak tepat waktu dan belum akurat. Sedangkan pada unsur informasi dan komunikasi masih ditemukan kurangnya koordinasi antara pengurus barang dengan bendahara sehingga terdapat perbedaan data laporan aset. Akibatnya, optimalisasi pengelolaan BMD tidak berpengaruh terhadap SPI secara signifikan.

Teori *new institutional* berpendapat bahwa organisasi dibentuk oleh konteks kelembagaan yang melingkupinya melalui proses menyesuaikan diri atau isomorfisme. Salah

satunya ialah isomorfisme paksaan (*coercive isomorphism*) yang muncul ketika organisasi menyesuaikan diri dengan tekanan dari negara, organisasi lain, atau publik. Misalnya ketika ada aturan yang ditetapkan pemerintah, maka organisasi harus menyesuaikan diri untuk menerima aturan tersebut (Joo *et al.*, 2017). Temuan penelitian ini membuktikan bahwa *coercive isomorphism* yang diterapkan oleh OPD melalui implementasi SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 sudah dilakukan namun belum maksimal. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya beberapa kelemahan dalam penerapan SPI terkait aset sebagaimana yang dijelaskan di atas. Implementasi SPI pada pengelolaan BMD yang kurang maksimal ini pada akhirnya tidak memiliki dampak pada peningkatan pengelolaan BMD yang optimal.

Temuan penelitian ini dapat memberikan informasi khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mengidentifikasi permasalahan dan kekurangan dalam implementasi SPI terkait manajemen aset. Informasi ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan penerapan SPI pada pengelolaan barang milik daerah. Agar SPI menjadi lebih baik, semua elemen organisasi harus bertanggungjawab dalam menerapkan SPI yang memadai (Syarifudin *et al.*, 2020). PP Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa sasaran pengendalian internal salah satunya adalah tercapainya pengamanan aset negara. Oleh karena itu, apabila SPI diterapkan dengan baik dan memadai dalam organisasi, maka akan meningkatkan pengelolaan BMD menjadi lebih optimal.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, serta pembahasan, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan BMD. Artinya, semakin tertib dan lengkapnya pelaksanaan inventarisasi, maka pengelolaan BMD akan semakin optimal. Sedangkan kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan BMD. Artinya, kompetensi aparatur dan SPI tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dalam optimalisasi pengelolaan BMD.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yakni pada proses pengumpulan data, dimana tidak banyak dari responden yang dapat langsung mengisi kuesioner dengan didampingi oleh peneliti dan peneliti tidak melakukan wawancara untuk memperdalam informasi, sehingga ada kemungkinan jawaban yang diberikan kurang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Saran

Bagi penelitian selanjutnya, dapat menambah variabel penelitian di luar penelitian ini yang diduga berpengaruh pada pengelolaan BMD seperti variabel komitmen pimpinan. Penelitian berikutnya juga dapat menguji kembali variabel dalam penelitian ini dengan menambahkan indikator atau dimensi yang digunakan dalam mengukur variabel, misalnya pada variabel kompetensi aparatur dapat ditambahkan indikator lainnya seperti keahlian. Penelitian selanjutnya juga disarankan mendampingi responden ketika melakukan pengisian kuesioner supaya jawaban yang diperoleh lebih tepat sasaran serta dapat ditambah dengan melakukan wawancara kepada responden agar informasi yang diperoleh lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisykurlillah, I., & Oktaviana, A. (2020). The Quality of State-Property Reporting: Determinants and Intervening Role of Optimization Management in Indonesia Regional Case. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 12(2), 127-139.
- Asman, A., Akram, H., & MT, A. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *ASSETS*, 6(1), 23–38.
- Astini, Y. (2018). Kualitas Aparatur, Sistem Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Efektivitas Manajemen Aset Tetap. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 173-184.
- Atikoh, N., Febrian, E., & Hendrawan, R. (2017). Fixed Asset Management in The Indonesian Government Agencies: A Case Study At Ministry Of Trade. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 5(12), 674-694.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Indeks Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2020. Jakarta.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W.W. (1983). Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organization Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Ekayanti, S. M., Rifa, A., & Irwan, M. (2018). Determinants Effectiveness Fixed Asset Management of District Government on the Island of Lombok. *International Journal of Business Management and Economics Research (IJBMER)*, 9(1), 1219-1229.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartati, S., Martini, R., dan Winarko, H. (2019). Manajemen Aset Bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Kajian pada Pemerintah Kota Palembang). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(1), 40-51.
- <https://bpkad.pelalawankab.go.id>. “Informasi Opini BPK Tahun 2020 Kabupaten Pelalawan”. Diakses pada 30 Maret 2022.
- <https://kumparan.com/selasarriau/3-mantan-anggota-dprd-pelalawan-kuasai-mobil-dinas-kpk-lapor-ke-polisi1vI4KpBfNAb>. “3 Mantan Anggota DPRD Pelalawan Kuasai Mobil Dinas, KPK: Laporan ke Polisi”. (Diakses pada 18 Juli 2021).
- Joo, S., Larkin, B., & Walker, N. (2017). Institutional Isomorphism and Social Responsibility in Professional Sports. *Sport, Business and Management: An International Journal*, 7(1), 38-57.
- Juliadi, M., Pituringsih, E., & Husnan, L. H. (2017). Determinants Test Of The Effectiveness Of Fixed Asset Management In Mataram City Government. *E-Proceeding STIE Mandala*, 572-593.
- Jusmin. (2013). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalitas Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Kota Baubau. *Tesis (Tidak Dipublikasikan)*. Program Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada.
- Kurniati, E., Asmony, T., & Santoso, B. (2017). Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu Hingga Kini). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 540-558.
- Kurniyanta, A., Roziq, A., & Sularso, R. A. (2018). Analisis Pengaruh Manajemen Aset, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pendapatan Dengan Optimalisasi Aset Idle Sebagai Variabel Intervening. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 12(1), 131-144.
- Leky, M. T. D. F., Subroto, B., & Rosidi, R. (2020). Factors Affecting Asset Management in Malacca District. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(2), 266-276.
- Lewier, Christy Natalia. (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan*

- Keuangan Daerah Kabupaten Klaten*. (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016). Diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/10300/>.
- Malau, F. (2017). *Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Daerah Melalui Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Samosir*. (Tesis Universitas Sumatera Utara, 2017). Diakses dari <http://repositori.usu.ac.id>.
- Pauweni, S., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian, dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 8(2), 50-61.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1), 37-46.
- Ratmono, D., & Rochmawati, A. (2018). Determinan Optimalisasi Penggunaan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 236-247.
- Sriastiti, N. L. P., Ningsih, N. L. A. P., & Yasa, P. N. S. (2020). The Influence of Asset Management Towards Optimization of State Assets in Working Units in the Denpasar High Court Region. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 7(1), 24-38.
- Syaifudin, M., Ritchi, H., & Avianti, I. (2020). Determinants of Asset Management Effectiveness and Its Impact on The Fairness of The Asset Presentation. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Vol, 12(2)*.
- Umbora, E., Falah, S., & Pangayow, B. J. (2018). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset*, 1(2), 90-112.
- Yanison. (2015). Naskah Akademik Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Daerah. <https://sumbarprov.go.id/home/news/>. (Diakses pada 10 Oktober 2021).